

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA PADANG**

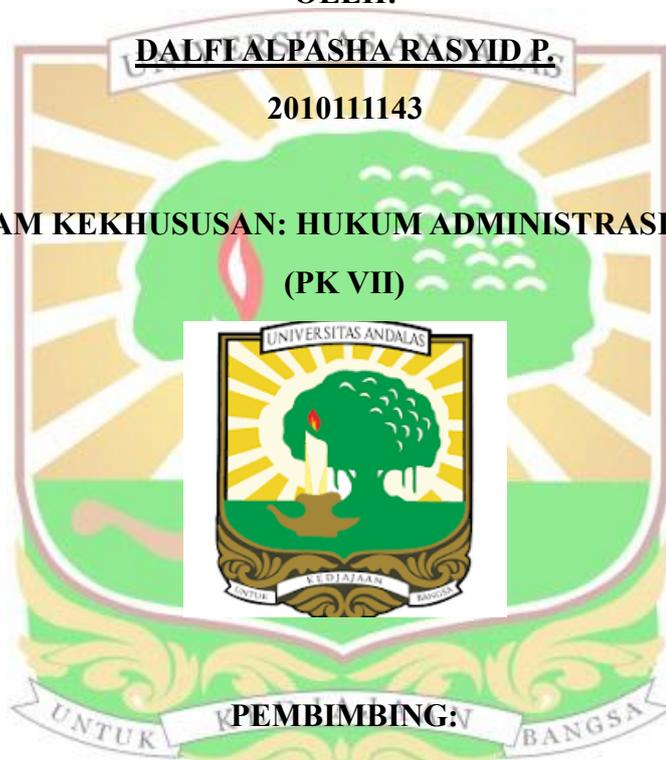
*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

DALFIALPASHA RASYID P.

2010111143

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**



Dr. Anton Rosari S.H., M.H

Romi S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

No.Reg : 17/PK-VII/III/2025

PENGAWASAN TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA PADANG

(Dalfi Alpasha Rasyid P., 2010111143, Hukum Administrasi Negara,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024, 66 Halaman)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan salah satu regulasi yang mengatur keberadaan Kawasan Tanpa Rokok, kemudian diatur secara rinci di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Regulasi ini harus di implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, namun pada fakta yang ada di lapangan hal ini dinilai belum maksimal dilakukan dikarenakan masih ditemukan oknum yang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, salah satunya di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Padang. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, *Pertama*, Bagaimana Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Padang? *Kedua*, Bagaimana Pengawasan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis yuridis kualitatif. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapat hasil sebagai berikut: *Pertama*, Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMAN 2 Kota Padang masih belum maksimal dilaksanakan, meskipun sekolah telah berusaha dengan memasang tanda larangan merokok dan melakukan razia, masih ditemukan pelanggaran oknum yang merokok baik oleh siswa maupun tenaga pendidik. *Kedua*, pengawasan terhadap KTR di SMAN 2 Kota Padang dinilai belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun telah dibentuk Satuan Tugas Pengawasan KTR, pelaksanaannya masih terbatas. Pelatihan untuk satuan tugas dan peningkatan edukasi kepada siswa dan masyarakat melalui sosialisasi serta layanan kesehatan sangat penting untuk memperkuat penegakan aturan KTR secara efektif.

Kata Kunci: *Pengawasan, Kawasan Tanpa Rokok.*